

**PENGEMBANGAN POTENSI HUTAN MANGROVE KABUPATEN WAKATOBI BERBASIS
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**Supriadi Takwim¹, Sitti Rabiatal Wahdaniyah Herman², Muhammad Yogi
Raditya³**

Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Universitas Tadulako
supriadi.takwim@untad.ac.id

ABSTRAK

Selain panorama alam bawah laut yang sudah lebih dahulu terkenal dan memberikan dampak secara langsung bagi masyarakat, Wakatobi juga memiliki sebaran hutan mangrove yang cukup luas khususnya di Pulau Kaledupa dan di beberapa lokasi lainnya. Adanya potensi mangrove yang sangat besar tersebut perlu dikaji lebih jauh khususnya terkait dengan rencana tata ruang yang meliputi kebijakan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap aspek lingkungan, sosial dan ekonomi kemasyarakatan. Adanya sebaran vegetasi mangrove di Kabupaten Wakatobi hendaknya dipandang sebagai sebuah potensi yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah selain pemanfaatan alam bawah laut. Konservasi hutan mangrove harusnya juga dapat memberikan timbal balik secara ekonomi sehingga konsep berkelanjutan dapat terselenggara untuk mencapai tujuan pengelolaan berkelanjutan. Pengembangan Potensi Hutan Mangrove di Kabupaten Wakatobi diperlukan untuk memaksimalkan fungsinya sebagai penyangga lingkungan pesisir maupun bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Kata Kunci : *Hutan Mangrove, Rencana Tata Ruang, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan*

LATAR BELAKANG

Wakatobi merupakan kependekan dari nama 4 (empat) pulau besar yang berada dikawasan Wakatobi yaitu pulau Wangi-Wangi, pulau Kaledupa, pulau Tomia dan pulau Binongko. Wakatobi merupakan kabupaten kepulauan yang memiliki wilayah 1.390.000 ha yang terdiri 39 (tiga puluh sembilan) pulau kecil, 3 (tiga) gosong dan 5 (lima) atol. Kepulauan Wakatobi yang merupakan gugusan pulau-pulau yang awalnya wilayah tersebut dikenal dengan Kepulauan Tukang Besi yang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara. Sejak tahun 2003, berdasarkan UU No.29 tahun 2003 Kabupaten Wakatobi menjadi sebagai daerah otonom yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton.

Sebagai daerah destinasi wisata, Kabupaten Wakatobi akan menjadi pusat perekonomian, sehingga akan menarik pengunjung dan tenaga kerja. Wakatobi ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata nasional dari sepuluh destinasi wisata nasional oleh Kementerian Pariwisata. Perkembangan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir Wakatobi untuk berbagai peruntukan (pemukiman, perikanan, pelabuhan, pariwisata dan lainnya) akan berdampak pada tingginya tekanan terhadap sumberdaya pesisir dan laut. Sebagai Taman Nasional Laut, perairan Kabupaten Wakatobi dalam pengembangan wilayah pesisir harus sesuai dengan rencana zonasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan, sehingga tidak berdampak pada sumberdaya pesisir dan laut.

Perairan Kabupaten Wakatobi memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang merupakan sumberdaya alam hayati yang cukup potensial, diantaranya adalah ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun dan ekosistem terumbu karang. Selain panorama alam bawah laut yang sudah lebih dahulu terkenal dan memberikan dampak secara langsung bagi masyarakat, Wakatobi juga memiliki sebaran hutan mangrove yang cukup luas khususnya di Pulau Kaledupa dan di beberapa lokasi lainnya. Adanya potensi

mangrove yang sangat besar tersebut perlu dikaji lebih jauh khususnya terkait dengan perencanaan pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat memberikan efek positif terhadap aspek lingkungan, sosial dan ekonomi kemasyarakatan.

Oleh karena itu dibutuhkan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengembangan potensi hutan mangrove dari sudut tata ruang wilayah. Hal tersebut perlu mempertimbangkan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengambil penelitian dengan judul “Pengembangan Potensi Hutan Mangrove Kabupaten Wakatobi Berbasis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan”.

TINJAUAN PUSTAKA

Hutan Mangrove

Mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam. Tanaman mangrove tidak dilindungi/dilarang untuk memanfaatkan bagian-bagian tanaman tersebut, misalnya dimanfaatkan untuk dijadikan bahan baku kosmetik/farmasi atau bahan tambahan tekstil (Dirjen P2HP, 2015).

Menurut Ana (2015) mangrove telah menjadi pelindung lingkungan yang sangat besar. Berikut ini adalah beberapa manfaat hutan mangrove secara umum, yaitu: mencegah erosi pantai; menjadi katalis tanah dari air laut; habitat perikanan; memberikan dampak ekonomi yang luas; sumber pakan ternak; mencegah pemanasan global; sumber pendapatan bagi nelayan pantai; menjaga kualitas air dan udara; pengembangan kawasan pariwisata; menyediakan sumber kayu bakar; pengembangan ilmu pengetahuan; dan menjaga iklim dan cuaca.

Rencana Tata Ruang

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan, untuk melihat struktur ruang pada kota. Pengertian tata ruang, diambil

dari buku Pengantar Hukum Tata Ruang (2016) karya Yunus Wahid, merupakan ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Rencana tata ruang terbagi menjadi tiga, yaitu: rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan istilah yang banyak digunakan oleh para ekonom dan pengambil kebijakan di seluruh dunia, meskipun gagasan ini masih agak baru dan memiliki interpretasi yang kurang seragam. Konsep pembangunan berkelanjutan masih terus dikembangkan dan definisi istilah ini masih terus-menerus direvisi. Menurut definisi klasik, yang dikemukakan oleh Komisi Dunia PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau pembangunan yang mempertemukan antara kebutuhan sekarang tanpa mengesampingkan ketersediaan kebutuhan pada generasi yang akan datang.” Hal ini biasa dipahami bahwa keadilan “antargenerasi” tidak mungkin dicapai tanpa adanya keadilan sosial di masa kini, atau jika kegiatan ekonomi beberapa kelompok terus membahayakan kesejahteraan milik kelompok lain atau kelompok yang tinggal di bagian lain (WCED Brundtland Commission, 1987).

Analisis Potensi Wilayah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Analisis potensi wilayah merupakan proses mengkaji secara ilmiah rincian semua kekayaan atau sumber daya fisik maupun non fisik pada area atau wilayah tertentu sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kekuatan tertentu. Rona fisik wilayah meliputi lokasi wilayah relative maupun absolut, luasan wilayah, bentuk lahan, kondisi topografi, kondisi lereng, kondisi tanah, kondisi iklim, kondisi hidrologi, kondisi

geologi, penggunaan lahan, dan kondisi fisik lainnya. Sedangkan rona non fisik meliputi kondisi sosial ekonomi wilayah.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Nasional, kebijakan pengembangan potensi wilayah meliputi perhitungan bobot masing-masing variabel, dimana khususnya terkait Mangrove meliputi:

- a. vegetasi mangrove;
- b. fasilitas dan aksesibilitas penunjang;
- c. sosial dan budaya masyarakat;
- d. obyek wisata penunjang;

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan azas perencanaan, meliputi: Pendekatan Terpadu (Integratif); Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan; Pendekatan Partisipatif; dan Pendekatan Spasial (Keruangan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah

Kawasan Hutan Mangrove Kabupaten Wakatobi terletak di seluruh kecamatan di Kabupaten Wakatobi yakni Kecamatan Wangi-wangi, Wangi-wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia, Tomia Timur, Binongko, dan Togo Binongko yang tercakup dalam 5 pulau, yakni Pulau Wangi-wangi, Pulau Kapota, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Luas kawasan hutan mangrove Kabupaten Wakatobi adalah 1.914,87 Ha.

Morfologi (bentuk lahan) suatu wilayah merupakan hasil dari pengaruh proses-proses alam dan struktur geologis pada material batuan dalam ruang dan waktu kronologis tertentu. Bentuk lahan Kabupaten Wakatobi terdiri atas wilayah dataran, lembah, perbukitan dan bukit bergelombang. Morfologi pantai merupakan hasil inetraksi proses dinamis dari aspek-aspek geologi (meliputi topografi, ketahanan litologi, hidrologi, aktivitas gunung api, tektonik dan proses sedimentasi); geofisika meliputi cuaca (hujan, angin, arus, gelombang dan pasang surut); dan faktor aktivitas manusia meliputi pengambilan

material baik di lepas pantai, pantai dan daratan, bangunan pantai, serta aktivitas pembangunan di darat. Interaksi antara beberapa faktor tersebut di atas menghasilkan karakteristik pantai yang berbeda antara pantai yang satu dengan lainnya.

Berdasarkan data BPS dalam Angka tahun 2021, dengan menggunakan Hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2020 sebesar 111.402 jiwa. Pertumbuhan penduduk sebesar 1,76 persen jika dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu. Dengan komposisi Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 55.827 jiwa dan perempuan sebanyak 55.575 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 100 dan kepadatan penduduk sebesar 235 penduduk per km².

Penggunaan lahan di Wakatobi beraneka ragam. Lahan pertanian di Kabupaten Wakatobi merupakan lahan pertanian lahan kering, meliputi ladang/huma, tegal/kebun, hutan rakyat dan perkebunan rakyat. Ladang/huma umumnya dimanfaatkan untuk tanaman padi ladang, hanya terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi , Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, dan Kaledupa Selatan. Lahan tegal/kebun umumnya untuk budidaya palawija, hortikultura dan buah-buahan tersebar di seluruh kecamatan. Lahan perkebunan rakyat dipergunakan untuk budidaya beberapa komoditi yaitu kelapa, kakao, jambu mete, kopi dan lainnya. Lahan perkebunan rakyat tersebar di seluruh kecamatan dengan luas tertinggi terdapat di Kecamatan Kaledupa dan Kaledupa Selatan. Terdapat pula lahan pertanian ditanami tanaman hutan (hutan rakyat) seluas 5.864 ha. Lahan bukan pertanian terdiri atas, padang rumput, lahan sementara tidak diusahakan dan lainnya. Proporsi lahan bukan pertanian menurut kecamatan tertinggi berada di Kecamatan Wangi-Wangi dan terendah di Tomia. Lahan bukan pertanian kategori sementara tidak diusahakan dan lahan lainnya relatif tinggi di seluruh kecamatan.

Potensi ekonomi Kabupaten Wakatobi bersumber dari beberapa sektor, yakni sektor kelautan dan perikanan; sektor pertanian dan peternakan; dan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM. Dalam sektor industri dan

perdagangan terdapat sektor pariwisata yang menjadi salah satu unggulan potensi ekonomi Kabupaten Wakatobi. Ketersediaan prasarana dan sarana diperlukan sebagai suatu kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. prasarana dan sarana dapat berupa prasarana dan sarana wilayah maupun fasilitas fisik dan sosial ekonomi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Kegiatan pembangunan infrastruktur teknis atau fisik dan prasarana adalah merupakan investasi pemerintah di sektor publik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas berupa jalan, air bersih, terminal, pelabuhan, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah, kelistrikan, dan telekomunikasi. Secara fungsional, prasarana dan sarana selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa. Sedangkan prasarana dan sarana sosial dapat berupa sekolah dan rumah sakit dimana secara fungsional adalah fasilitasi kebutuhan dasar manusia.

Analisis Wilayah Perencanaan

1. Analisis Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Berdasarkan Arahan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wakatobi hingga tahun 2025 yang akan datang, misi pembangunan Kabupaten Wakatobi terkait mangrove yaitu mendorong konservasi dan rehabilitasi biodiversitas fisik-biologis wilayah. Pada RPJMD ke IV diharapkan kondisi biodiversitas fisik-biologis wilayah Kabupaten Wakatobi semakin terjaga kelestariannya sekaligus memainkan peran ganda sebagai modal pembangunan dan sebagai penopang sistem kehidupan perekonomian.

Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi No.

12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wakatobi merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, maka Pemerintah Kabupaten Wakatobi merumuskan dalam RTRW pasal 16 bahwa kawasan pantai berhutan bakau masuk dalam Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang harus dilindungi. Kawasan pantai berhutan bakau yaitu kawasan pantai berhutan bakau yang memiliki keanekaragaman hayati yang terdapat di Kecamatan Wangi-Wangi, Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa, Kaledupa Selatan, Tomia Timur, dan Togo Binongko.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah pesisir dan kepulauan sehingga kaya akan keberagaman sumber daya hayati dengan karakteristik wilayah pesisir yang perlu dijaga kelestariannya. Pariwisata laut/ bahari dan pariwisata pegunungan/daratan merupakan dua jenis pariwisata yang ditawarkan dalam kawasan peruntukkan pariwisata alam di Wilayah Kabupaten Wakatobi. Beberapa potensi pariwisata pantai dan panorama laut di Kabupaten Wakatobi yang diprioritaskan untuk dikembangkan meliputi kawasan pariwisata di setiap Pulau Wangi- Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia dan Pulau Binongko. Pengembangan kegiatan ekowisata terpadu dikembangkan di Pulau Tomia.

Taman Nasional Wakatobi dikelola dengan sistem zonasi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam (PHKA) No. SK. 149/iv-KK/2007 tanggal 23 Juli 2007 yang berisi bahwa terdiri atas: zona inti seluas 1.300 Ha; zona pemanfaatan bahari seluas 36.450 Ha; zona pariwisata seluas 6.180 Ha; zona pemanfaatan lokal seluas 804.00 ha; zona pemanfaatan umum seluas 495.700 ha; dan zona khusus darat seluas 46.370 ha.

Ruang publik diarahkan terletak pada kawasan yang berada di luar, sedangkan ruang usaha didesain pada kawasan pesisir dengan pertimbangan bahwa potensi dan

kondisi wilayah dalam beberapa titik di zona pariwisata yang berada di pesisir telah dilakukan usaha pariwisata alam dan dimungkinkan untuk pembangunan sarana pariwisata secara terbatas seperti pembangunan dermaga, mourning buoy dan sejenisnya. Luasan pembangunan dermaga atau sejenisnya tidak lebih dari ukuran panjang menyesuaikan dengan panjang tubir pantai dan lebar 100 meter.

TN Wakatobi juga menetapkan zona khusus daratan difokuskan pada lima lokasi Model Desa Konservasi (MDK), Pengembangan MDK dimaksudkan sebagai salah satu alternative daerah tujuan wisata di TNW, sehingga diperlukan penguatan pembangunan di dalamnya.

2. Analisis Kondisi Vegetasi Kawasan Mangrove

Ketersediaan vegetasi mangrove berada di seluruh pulau yang ada di Kabupaten Wakatobi. Keberadaan vegetasi mangrove terbesar berada di Pulau Kaleduppa yakni hampir berada di seluruh desa (Desa Lulua, Desa Langge, Desa Sombano, Desa Buranga, Desa Balasuna, Desa Horuo, dan Desa Tampara. Sedangkan di Pulau Wangi-wangi terdapat di Desa Liya Bahari dan Desa Liya Togo. Vegetasi mangrove di Pulau Tomia terdapat di Desa Lamanggau, Desa Waiti, Desa Timu, Kelurahan Patipelong, dan di Pulau Binongko terletak di Desa Popalia, Desa Taipabu, dan Desa Makoro.

Berdasarkan data jenis mangrove, dijumpai 13 marga dan 28 jenis mangrove, yakni *Rhizophoraceae* (8 jenis), *Avicenniaceae* (4 jenis), *Sonneratiaceae* (2 jenis), *Meliaceae* (2 jenis), *Rubiaceae* (2 jenis), *Malvaceae* (2 jenis), *Leguminosae* (2 jenis), *Apocynaceae* (1 jenis), *Combretaceae* (1 jenis), *Guttiferae* (1 jenis), *Lecythidaceae* (1 jenis), *Melastomataceae* (1 jenis), *Pandanaceae* (1 jenis). Berdasarkan 28 jenis mangrove tersebut, terdapat 20 jenis mangrove sejati dan 8 jenis mangrove ikutan.

Marga *Rhizophoraceae* memiliki kerapatan tertinggi mencapai 30 individu per m² pada strata pertumbuhan semai. Kerapatan

vegetasi mangrove cenderung menurun dalam 4 tahun terakhir terjadi pada setiap lokasi dan hampir pada semua strata pertumbuhan. Kerapatan vegetasi tertinggi berada di lokasi Pulau Wangi-wangi pada marga *Rhizophoraceae* kategori semai dan pancang, lalu disusul oleh kerapatan kedua tertinggi di Pulau Kaledupa kategori semai. Sedangkan vegetasi mangrove dengan kategori pohon memiliki kerapatan paling rendah di semua lokasi.

Frekuensi suatu jenis mangrove menunjukkan penyebaran suatu jenis dalam suatu area. Berdasarkan data ditemukan bahwa, sebaran jenis mangrove di komunitasnya pada empat tahun terakhir relatif stabil dengan perjumpaan tertinggi pada marga *Rhizophoraceae*. Frekuensi tertinggi untuk kategori pohon ditemukan di Pulau Kaledupa. Sedangkan untuk kategori pancang dan semai paling banyak ditemukan di Pulau Kaledupa dan Pulau Wangi-wangi.

Dominansi merupakan nilai yang menunjukkan penguasaan suatu jenis terhadap suatu komunitas. Berdasarkan data, marga *Sonneratiaceae* dan *Rhizophoraceae* merupakan mangrove dengan penguasaan ruang tertinggi. Bentuk penguasaan tertinggi dari setiap spesies dengan kategori pohon berada di Pulau Wangi-wangi.

Indeks Nilai Penting merupakan hasil penjumlahan dari 3 variabel sebelumnya setiap spesies. Berdasarkan data, marga *Rhizophoraceae* memiliki peran tertinggi di komunitas mangrove Wakatobi pada setiap monitoring. Dari semua variabel, Indeks Nilai Penting tertinggi untuk marga *Rhizophoraceae* berada di Pulau Kaledupa dengan kategori pohon, pancang, dan semai yang cukup seimbang.

3. Analisis Fasilitas Penunjang Sektor Unggulan

Berdasarkan data dinas pariwisata Kabupaten Wakatobi dalam “handbook for tourist” yang diterbitkan, berikut ketersediaan sarana akomodasi di masing-masing lokasi: terdapat 16 sarana akomodasi. Keberadaan fasilitas

rumah makan merupakan salah satu hal yang dianggap penting dalam pariwisata. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten, Fasilitas rumah makan/restoran jumlah dan sebarannya di Kabupaten Wakatobi masih cukup terbatas. Fasilitas rumah makan/restoran belum tersedia di semua pulau-pulau utama. Wisatawan yang berkunjung ke Kaledupa dan Binongko menghadapi kesulitan memperoleh layanan fasilitas rumah makan. Fasilitas keuangan dan penukaran uang masih terbatas jumlah dan sebarannya. Keberadaan transaksi keuangan baik bank, ATM dan atau tempat penukaran uang bagi masyarakat dan wisatawan. Fasilitas keuangan dan penukaran uang hanya terdapat di Pulau Wangi-wangi, sementara di tiga pulau utama lainnya belum tersedia.

Di kawasan Wakatobi terdapat 7 buah pos yang terdiri dari kantor pos pembantu sebanyak dua buah yang terletak di Wangi-wangi dan Binongko; rumah pos (2 buah) yang terletak di Tomia, Kaledupa dan Wangi-wangi; pos keliling (satu buah) yang terdapat di Wangi-wangi serta satu buah bis surat yang terdapat di Kecamatan Wangi-wangi (RIPPARDA Kabupaten Wakatobi).

4. Analisis Aksesibilitas

Maskapai yang saat ini melayani rute penerbangan ke Wakatobi dari Jakarta (transit Makassar dan Kendari) yaitu Wings Air, dengan jadwal penerbangan lima kali dalam seminggu pada pagi hari. Selain itu, untuk tamu yang menggunakan Wakatobi Dive Resort akan menggunakan pesawat sendiri dan mendarat di landas pacu di Pulau Tomia. Selain itu, meskipun bandara di Wakatobi berjumlah dua buah akan tetapi hanya satu bandara yang dapat diakses oleh masyarakat umum yaitu bandara Matahora. Bandara yang dimiliki oleh Wakatobi Dive Resort (WDR-Tomia) digunakan terbatas untuk tamu mereka dan terbang langsung dari Bali.

Moda transportasi yang digunakan sebagai

penghubung antar pulau adalah jenis transportasi laut, yakni kapal laut. Sarana pelabuhan baik besar maupun kecil terletak di seluruh pulau utama Wakatobi. Kelemahan dari beberapa jadwal kapal antar pulau terutama yang berjarak jauh seringkali harus menunggu hingga kapal penuh oleh penumpang, sehingga menyebabkan keterlambatan jadwal.

Moda transportasi lokal (darat) untuk pengunjung umum yang terdapat di pulau-pulau utama Kabupaten Wakatobi menggunakan jasa ojek dengan tarif antara Rp.3.000,-s/d Rp.100.000,- tergantung jarak dan medan yang ditempuh. Selain itu, persewaan kendaraan roda empat juga tersedia dengan tarif yang sangat bervariasi dengan kisaran harga Rp.300.000,- s/d Rp.400.000,-. Jaringan jalan secara umum belum mendukung konektivitas pusat-pusat kota dengan daya Tarik wisata dan antar daya Tarik wisata. Jaringan jalan yang menghubungkan antar kota-kota kecamatan relative baik akan tetapi banyak daya Tarik wisata potensial yang belum memiliki perkerasan seutuhnya (Data RIPPARDA Kabupaten Wakatobi).

5. Analisis Sosial Ekonomi

Analisis ini membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap keberadaan kawasan mangrove dan bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan mangrove.

Berdasarkan data Rencana Pengelolaan Pariwisata Wakatobi, masyarakat di Pulau Wangi-wangi antusias memberikan dukungan terhadap rencana pengembangan pariwisata Pulau Wang-wangi, terlebih apabila dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Sementara, masyarakat menyadari bahwa adanya masalah keterbatasan sumber daya masyarakat sehingga perlunya keterlibatan dari seluruh masyarakat.

Hutan mangrove di Pulau Kaledupa telah menjadi hal penting untuk mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Namun, kekayaan alam tersebut seringkali mendapatkan ancaman dari warga yang

bermukim di seputar pesisir pantai. Masyarakat pesisir cenderung menjadikan hutan mangrove sebagai sasaran aktivitas sehari-hari untuk dijadikan kayu bakar. Apabila hal ini dibiarkan terjadi secara terus menerus maka dikhawatirkan hutan mangrove akan punah seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan tidak diimbangi dengan informasi dan pengetahuan.

Hutan mangrove di Pulau Tomia juga telah mengalami tekanan dari masyarakat setempat dan dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan rumah tangga. Pada dasarnya, masyarakat setempat juga memiliki keinginan untuk mengembangkan kawasan pariwisata. Namun, para pihak di Tomia menginginkan pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan berbasis masyarakat lokal sehingga memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Mereka menyadari masih kurangnya pemahaman tentang pariwisata di masyarakat, dan kesulitan mengembangkan potensi yang dimiliki, termasuk kendala di pendanaan awal.

Masyarakat Pulau Binongko lebih mengutamakan sektor perikanan laut, untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Binongko. Masyarakat menyadari akan besarnya potensi tersebut, namun, karena pemahaman dan kemampuan mereka yang terbatas, mereka kesulitan dalam mengembangkan potensi tersebut. Untuk itu mereka mengharapkan pemda dapat melakukan sosialisasi tentang pariwisata, dan dukungan pembangunan infrastruktur khususnya jalan.

6. Analisis Area Pendukung Sektor Unggulan

Pulau Wangi-wangi sebagai ibukota di wakatobi merupakan pulau yang paling maju diantara semuanya. Pulau Wangi-wangi memiliki potensi daya tarik wisata baik pantai, danau, gua maupun puncak (dataran tinggi). Pantai yang umum dikunjungi oleh wisatawan di pulau Wangi-wangi Pantai Cemara, dan Pantai Molii. Selain itu, terdapat pula 7 objek wisata Benteng dapat

dijadikan sebagai wisata sejarah, Mercusuar Waha, Wungka Toliamba, dan Gua Air. Aktivitas yang dapat dilakukan di pulau ini diantaranya tour suku bajo dan kano. Sedangkan events yang diadakan di Pulau wangi-wangi adalah Festival Keraton Liya dan Festival Wakatobi.

Kaledupa merupakan pulau kedua terbesar setelah Wangi-wangi yang menyimpan berbagai potensi wisata baik lautan maupun daratan. Potensi wisata yang ada terdiri atas pantai, danau, gua serta dataran tinggi, pantai yang sering dikunjungi oleh wisatawan adalah Pantai Peropa yang terletak di desa Peropa serta pantai Sombano yang terletak di desa Sombano. Terdapat pula Gua Darawa, Kampung Pajam, dan 4 Benteng. Event tahunan yang diadakan di pulau ini adalah Barata Kahedupa Festival.

Pulau Tomia didominasi oleh padang rumput, dan memiliki sedikit kantung-kantung hutan tersisa. Ekosistem padang lamun dan terumbu karang mengitari pulau ini dengan areal pasang surut cukup luas. Beberapa pantai yang indah dan sering dikunjungi oleh wisatawan antara lain Pantai Hu’untete dan Pantai Te’e Timu. Kemudian, terdapat pula 4 Benteng dan Gua Air. Tomia juga mempunyai puncak yang indah untuk menikmati pemandangan yaitu Puncak Kahiangan dan Puncak Waru Usuku di Tomia Timur. Event yang ada yakni Festival Tomia Kawati, Festival Benteng Patua, Festival Kasilapa, dan Festival Potapaki.

Pulau Binongko memiliki beberapa pantai yang menjadi daerah tujuan wisatawan, yakni Pantai Palahidu, Pantai Yoro, Pantai Buku, Pantai One Melangka, Pantai We’e. Selain pantai, terdapat pula 5 serta Taman Batu Taduna. Events yang diadakan di Pulau Binongko adalah Festival Silambi, Karia Wali Ajamani, Festival Sulawoka, dan Festival Pandai Besi.

7. Analisis Prioritas Pengembangan

Potensi Kawasan Hutan Mangrove tersebar diseluruh pulau utama di Kabupaten

Wakatobi, oleh sebab itu perlu dilakukan prioritas pengembangan hutan mangrove. Dalam menentukan kawasan prioritas pengembangan hutan mangrove, dilakukan dengan analisis variabel-variabel sebelumnya sebagai pertimbangan, yakni:

- Vegetasi mangrove di masing-masing pulau utama yang menjadi poin dan fokus utama dalam penentuan kawasan prioritas;
- ketersediaan fasilitas penunjang wisata di masing-masing pulau utama;
- aksesibilitas di masing-masing pulau utama;
- sosial dan budaya masyarakat di masing-masing pulau utama terkait mangrove; dan
- ketersediaan obyek wisata pendukung di masing-masing pulau.

Dalam penentuan bobot, variabel vegetasi mangrove dan sosial budaya masyarakat terkait hutan mangrove lebih besar (dilipat gandakan) dari variabel lainnya. Berikut hasil perhitungan bobot dari masing-masing variabel:

Tabel 1. Bobot Variabel Prioritas Pengembangan Potensi Wilayah

Variabel	Bobot			
	Wangi-wangi	Kaledupa	Tomia	Binongko
Jenis Mangrove (bobot x 2)	4	8	4	4
Indeks Nilai Penting (Bobot x 2)	4	6	4	0
Fasilitas Penunjang	4	2	3	1
Aksesibilitas	4	3	4	3
Persepsi Masyarakat (Bobot x 2)	4	4	2	2
Peran Serta Masyarakat (Bobot x 2)	6	8	4	4
Obyek Wisata Penunjang	4	3	4	3
Jumlah	30	34	25	17

Sumber: Analisis Penulis, 2022

Berdasarkan seluruh variabel yang telah dianalisis, maka didapatkan prioritas kawasan pengembangan berada di Pulau Kaledupa, selanjutnya disusul oleh Pulau Wangi-wangi, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko.

Pengembangan Potensi Hutan Mangrove

1. Rencana Pengembangan Makro

- Rencana Kebijakan dan Konsep Pengembangan Hutan Mangrove. Sasaran kebijakan hutan mangrove

Wakatobi adalah:

- Mengurangi tekanan terhadap ekosistem mangrove Wakatobi demi menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan, dalam bentuk:
 - Revitalisasi fungsi ekosistem hutan mangrove Wakatobi dalam bentuk melakukan penanaman kembali (reforestation) di daerah yang telah rusak tegakan mangrovenya, yakni di Pulau Kaledupa, Pulau Wangi-wangi, dan Pulau Tomia.
 - Menyusun rencana program dan kegiatan rehabilitasi mangrove Wakatobi (luas dan lokasi, jenis yang ditanam, penanaman dan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi, serta teknik rehabilitasi mangrove yang dipergunakan).
 - Mengembangkan manfaat sosial ekonomi kawasan, dalam bentuk:
 - Merumuskan kembali sistem kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove Wakatobi dengan adanya sinergitas antara pemerintah daerah Wakatobi, lembaga sosial seperti (WWF dan Balai Taman nasional), dan masyarakat dalam mendukung fungsi ekologi dan ekonomis kawasan tersebut.
- b. Konsep pengembangan makro yang dirumuskan guna mempertahankan keberlangsungan hutan mangrove Wakatobi adalah konsep mina hutan (syvifishery), konsep pengembangan mangrove berbasis masyarakat, konsep pengembangan mangrove berkelanjutan, konsep pengembangan mangrove sebagai penguat identitas budaya.
- c. Rencana potensi pemanfaatan mangrove yang merumuskan berbagai kreasi-kreasi oleh masyarakat lokal yang berasal dari pemanfaatan mangrove.
- d. Rencana kelembagaan yang merumuskan adanya integrasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga pemerhati lingkungan dalam pengelolaan mangrove

Wakatobi.

2. Rencana Pengembangan Mikro

1. Aktivitas diantaranya menikmati ekosistem hutan mangrove Wakatobi dengan berbagai macam flora dan fauna didalamnya, bird watching, jogging & mangrove track, atraksi wisata air (perahu wisata dan water sport). Selain itu juga direncanakan sebagai kawasan eduwisata.
2. Rencana aksesibilitas menuju Kawasan Wisata Mangrove adalah dengan mengadakan simpul transportasi sebagai penunjang pelabuhan yang ada. Wisatawan yang datang dengan menggunakan kapal laut dapat melanjutkan perjalanan menuju kawasan wisata mangrove menggunakan moda motor.
3. Fasilitas pendukung wisata hutan mangrove seperti, fasilitas akomodasi, rumah makan, dan lain sebagainya.
4. Sistem jaringan infrastruktur yang saling terintegrasi antara lain, jaringan listrik, air bersih, dan persampahan.
5. Sistem kelembagaan wisata mangrove Kaledupa yang meliputi komunitas masyarakat sebagai tokoh utama dibantu oleh pemerintah sebagai regulator, pemerintah daerah, dan lembaga pemerhati lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis diperoleh beberapa kesimpulan, meliputi:

1. Dari aspek kondisi vegetasi mangrove di pulau-pulau utama Wakatobi, jenis dan indeks nilai penting (INP) mangrove terbesar berada di Pulau Kaledupa, sedangkan yang paling kecil berada di Pulau Binongko.
2. Dari aspek ketersediaan fasilitas penunjang, Pulau Wangi-wangi memiliki poin yang paling besar, mengingat keberadaannya yang merupakan ibukota Kabupaten Wakatobi. Sedangkan, ketersediaan fasilitas penunjang paling minim berada di Pulau Binongko.
3. Dari aspek aksesibilitas, Pulau Wangi-wangi dan Pulau Tomia merupakan pulau yang

- paling mudah dijangkau, Karena memiliki seluruh jenis transportasi baik udara, laut, maupun darat. Sedangkan, Pulau Kaledupa dan Pulau Binongko hanya dapat diakses melalui kapal laut.
4. Berdasarkan aspek persepsi masyarakat, Pulau Wangi-wangi dan Kaledupa memiliki poin tertinggi. Hal ini dikarenakan, masyarakat di kedua pulau mendukung untuk perwujudan kawasan pariwisata terpadu, SDM yang memadai, walaupun penggunaan mangrove oleh masyarakat belum dilakukan secara bijak karena pemanfaatan yang berlebihan. Sedangkan, dari segi peran serta masyarakat, Pulau Kaledupa memiliki peran serta terbesar dikarenakan memiliki 5 komunitas masyarakat, diantaranya adalah komunitas ekowisata.
 5. Dari aspek ketersediaan obyek wisata pendukung, Pulau Wangi-wangi memiliki obyek wisata pendukung terbanyak, dan Pulau Binongko merupakan pulau paling minim akan ketersediaan obyek wisata penunjang selain mangrove.
 6. Berdasarkan seluruh variabel yang telah dianalisis sebelumnya, maka didapatkan prioritas kawasan pengembangan berada di Pulau Kaledupa, selanjutnya disusul oleh Pulau Wangi-wangi, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko.
- Rencana Induk Pariwisata Nasional.
- [5] Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 12 tahun 2012 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN WAKATOBİ TAHUN 2012 – 2032.
 - [6] Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 4 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025.
 - [7] Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, Amiruddin A. Fisru, Didiharyono. 2018. Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). Jurnal Prosiding Universitas Cokroaminoto Palopo. Palopo.
- [2] Muhammadiyah, E. Aminullah dan B. Soesilo. 2001. Analisis Sistem Dinamis: Lingkungan Hidup, Sosial, Ekonomi, Manajemen. UMI Press. Jakarta.
- [3] Noor, Yus Rusila dkk., 1999. Panduan Pengenalan Mangrove Di Indonesia. PKA/WI-IP. Bogor.
- [4] Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan